



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat Telp. 0823-9888-8900 website
<https://sulbar.bpk.go.id>, twitter: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS PEMERIKSAAN KINERJA DAN LHP ATAS PEMERIKSAAN KEPATUHAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH SE-SULAWESI BARAT

Mamuju – Humas dan TU Perwakilan

Kamis (18/01) – Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, **Hery Ridwan**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tematik dan Kepatuhan atas Belanja Daerah Semester II Tahun 2023 kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili di Ruang Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis 18 Januari 2024. Adapun LHP yang diserahkan meliputi:

1. LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada pemerintah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa
2. LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kakao dan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju
3. LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa, dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Majene
4. LHP Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d Oktober 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu

Dalam sambutannya, Hery Ridwan menyampaikan bahwa Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam menjalankan suatu program/kegiatan, sedangkan Pemeriksaan Kepatuhan bertujuan untuk menilai apakah program/kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harapannya, hasil pemeriksaan tersebut mampu membantu Kepala Daerah, DPRD dan para *stakeholders* dalam mengurai permasalahan dan mencari solusi melalui rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPK.

Pada LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* Tahun Anggaran 2022 dan 2023 memuat beberapa masalah signifikan yaitu 1) pemerintah daerah belum mengintegrasikan target penurunan prevalensi *stunting* yang selaras dengan target nasional; 2) pemerintah daerah belum sepenuhnya mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk intervensi spesifik, sensitif, dan koordinatif yang sesuai dengan kebutuhan penurunan prevalensi *stunting*; dan 3) pemerintah daerah belum optimal dalam menyediakan dan mengupayakan pemenuhan tenaga kesehatan dan alat kesehatan



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat Telp. 0823-9888-8900 website
<https://sulbar.bpk.go.id>, twitter: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

yang memadai serta belum optimal dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan penurunan *stunting* dalam sistem informasi yang andal.

Selain itu, pada LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa, dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu di Kabupaten Majene memuat beberapa permasalahan signifikan yaitu Pemerintah Kabupaten Majene belum melakukan evaluasi penggunaan dana desa secara memadai dan belum melakukan pembinaan yang memadai atas proses pendirian BUM Desa.

Sedangkan pada LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kakao dan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju memuat beberapa permasalahan signifikan yaitu Pemerintah Kabupaten Mamuju belum memiliki strategi pengembangan komoditas kakao dan kelapa sawit pada sektor hulu dan hilir dan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan komoditas kakao dan kelapa sawit Kabupaten Mamuju belum memadai.

Selain LHP Kinerja, pada LHP Kepatuhan Belanja Daerah pada Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu terdapat beberapa permasalahan yaitu terdapat kekurangan volume pada pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Gedung dan Bangunan, serta Peralatan dan Mesin pada tiga entitas pemeriksaan sebesar Rp2,4 miliar; terdapat kelebihan pembayaran dan pekerjaan tidak sesuai ketentuan; dan terdapat keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan denda pada tiga entitas pemeriksaan sebesar Rp189 juta.

Sesuai pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat entitas wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK serta wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada LHP tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**